

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang yang diperoleh penulis selama masa penelitian, data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuisioner (angket) dan mengambil referensi dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Kuisioner dalam penelitian ini bersifat terbuka dan tertutup, responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia, kemudian setiap jawaban dari pertanyaan akan didistribusikan kedalam bentuk tabel frekuensi.

#### 5.1. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden yang berjumlah 99 orang yang terdiri dari : Jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir.

##### 5.1.1 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 5.1

Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
1	Laki-Laki	47	47.47%
2	Perempuan	52	52.53%
	Jumlah	99	100%

Sumber : kantor Camat Tambang tahun 2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa reponden laki-laki sebesar 47,47% sedangkan frekuensi responden perempuan sebesar 52,53% atau responden merupakan mayoritas dari keseluruhan sampel diantaranya :Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

### 5.1.2 Identitas Responden Menurut Usia

**Tabel 5.2**

#### Responden Menurut Usia

No	Usia	Responden	Persentase (%)
1	20-30	39	39.51%
2	31-40	49	49.49%
3	41-50	11	11.%
	Jumlah	99	100%

*Sumber data : Hasil Interview Responden*

Berdasarkan tabel 5.2 terlihat bahwa mayoritas tingkat umur responden di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu berada pada usia 20-30 tahun sebanyak 39 orang atau 39,51%. Kemudian yang kedua pada usia 31-40 tahun sebanyak 49 orang atau 49,49% dan hanya 11 responden atau 11,% yang berusia 41-50 tahun.

### 5.1.3 Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel 5.3**

#### Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase (%)
1	SD	4	4.04%
2	SMP/Sederajat	9	9.09%
3	SMA/ Sederajat	54	54.54%
4	Diploma (D-2/D-3)	11	11.11%
5	Sarjana(S1)	14	14.14%
6	Pasca Sarjana(S2)	7	7.07%
	Jumlah	99	100%

*Sumber data : Hasil Interview Responden*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan responden di desa balam jaya kecamatan Tambang Kab. Kamparyaitu tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 14 responden atau 14,14%. Sedangkan tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 54 responden atau 54,54% dan tingkat pendidikan pasca sarjana sebanyak 7 responden atau 7,07% dan hanya 11 atau 11,11% yang memiliki tingkat pendidikan D2/D3( Diploma).

### 5.2. Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi rakyat Indonesia. Pembangunan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan desa. Dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi).

Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program/proyek pembangunan desa. Dalam perkembangannya lahir lah undang undang Desa Nomor 06 tahun 2014 tentang desa bahwa desa bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan pembangunan yang sistematis.

Perencanaan pembangunan yang terintegrasi tersebut kemudian menjadi makna inti dari pembangunan desa, pasca keluarnya Undang undang tentang Desa dimana semangat 1 desa, satu perencanaan dan 1 penganggran mulai dipakai, artinya semua perencanaan baik dari partisipatif, politis, maupun partisipatif harus mengacu pada perencanaan pembangunan desa yang terdokumentasi dalam Rencana pembangunan jangka menengah desa.

Desa sekarang telah memiliki kewenang yang cukup besar, Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam pelaksanaan pembangunan ayat 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ayat 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembangannya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa. Sebenarnya pelibatan masyarakat atau partisipasi pembangunan desa sudah dimulai dari program program pemberdayaan. Program program pemberdayaan tersebut dijalankan karena ada pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa kurang efektif

Dengan adanya perencanaan yang matang dan tepat maka pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Oleh karena itu seharusnya perencanaan menjadi perhatian penting dalam Pembangunan Desa.

Sehubungan dengan perencanaan yang menjadi bahan perhatian penting dalam pembangunan Desa di Desa balam jaya kecamatan tambang kabupaten kampar, maka di lihat dari beberapa sub indikator nya sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5.2.1 Menyusun Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sesuai Dengan Kewenangan Dengan Mengacu Pada Perencanaan Pembangunan Kab/Kota

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Didalam UU Desa pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota kemudian dituangkan dalam Dokumen Jangka menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa memberikan arah kepada Kepala Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai visi dan misi Desa, menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan



Kabupaten/Kota, serta pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Untuk mengetahui berapa rencana Belanja Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4**  
**Daftar Belanja Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2016**

No	Belanja	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 308.710.050
2	Bidang Pembangunan	Rp. 1.043.655.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 11.600.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 49.081.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 1.413.046.050</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Balam Jaya Tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk belanja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa sebesar Rp. 308.710.050, untuk belanja Bidang Pembangunan sebesar Rp. 1.043.655.000, kemudian untuk belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 11.600.000 sedangkan untuk belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 49.081.000. Berdasar kan daftar belanja Desa diatas dapat kita ketahui bahwa anggaran untuk belanja Bidang pembangunan sangat besar, oleh karena itu perencanaan yang matang sangat di perlukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Negara maupun masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam peta pembangunan saat ini desa masih menjadi subyek yang kecil keterlibatannya untuk menentukan arah pembangunan. Desa selalu dipaksa untuk menerima semua bentuk program atau proyek dari tanpa mempunyai kewenangan untuk mengelola atau menyesuaikan dengan rencana pembangunan desa yang telah disusun dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk jangka waktu tertentu, akibatnya program dan proyek berjalan sendiri-sendiri dan kurang berdampak pada kesejahteraan desa.

Dengan undang-undang desa, peluang dan harapan baru untuk menjadikan Desa menjadi hebat. Dengan Desa hebat, mimpi mewujudkan kesejahteraan dilevel Desa menjadi semakin dekat. Dengan berbagai kewenangan dan alokasi anggaran yang cukup besar, maka desa memiliki kesempatan untuk merajut kesejahteraan tersebut. Tentu ada prasyarat-prasyarat yang harus terpenuhi untuk mewujudkan itu, desa harus mulai merancang strategi pembangunan yang benar-benar sesuai dengan masalah. Menyusun perencanaan dalam melakukan sesuatu sangat penting.

**Tabel 5.5**  
**Pernyataan Responden Perencanaan Pembangunan Desa Disusun Sesuai Dengan Kewenangan**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	18	18.1%
2	Sesuai	52	52.5%
3	Cukup Sesuai	10	10.1%
5	Kurang Sesuai	15	15.1%
6	Tidak Sesuai	4	4.04%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2017



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa dari 99 reponden, sebanyak 18 reponden atau 18,1% yang merasa sangat sesuai bahwa perencanaan pembangunan desa sudah disusun sesuai dengan kewenangan, yang menjawab sesuai sebanyak 52 responden atau 52,5%, yang menjawab cukup sesuai sebanyak 10 responden atau 10,1%, yang menjawab kurang sesuai sebanyak 15 responden atau 15,1%, sementara yang menjawab tidak sesuai sebanyak 4 responden atau 4,04%.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa di desa balam jaya kecamatan tambang kabupaten kampar sebagian besar responden menyatakan sesuai bahwa perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa sudah disusun sesuai dengan kewenangan, dan selanjutnya ada pula yang menyatakan kurang sesuai bahwa perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa sudah disusun sesuai dengan kewenangan dengan alasan pembangunan yang kurang tepat sasaran, dan tidak mendahulukan pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas desa.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan yang dimaksud responden kurang sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sudah di susun dengan kewenangan antara lain kurang meratanya pembangunan didesa balam jaya kecamatan tambang kabupaten kampar, seperti masih terdapat nya jalan desa yang belum di semenisasi sehingga masyarakat merasa kurang nyaman saat melalui jalan tanah yang apabila hujan turun maka jalan tersebut tergenang air atau becek.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **5.2.2 Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Selenggarakan Dengan Mengikutsertakan Masyarakat**

Motor penggerak pembangunan adalah masyarakat atau lebih dikenal dengan Community driven development (CDD), dengan lahirnya Undang Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengawali era baru dalam pembangunan, bahwa motor penggerak pembangunan adalah Pemerintah Desa atau yang lebih dikenal dengan Village Driven Development (VDD).

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ini sangat jelas terlihat dalam Pasal 80 ayat 1 undang Undang Desa No 06 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dan dalam menyusun pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dalam era undang Undang Desa no 06 tahun 2014 ini upaya pemerintah semakin nyata dalam memberikan kewajiban jelas bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, dengan demikian masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan agar cita cita pembangunan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat terbuka secara eksistensif dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok-kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (winarso, 2007:64).

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan, 2009:1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ketentuan umum permendagri lebih jelas dikatakan pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemaparan diatas sangat jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

**Tabel 5.6**  
**Pernyataan Responden Perencanaan Pembangunan Desa Diselenggarakan Dengan Mengikutsertakan Masyarakat**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	20	20.0%
2	Sesuai	40	40.4%
3	Cukup Sesuai	15	15.1%
5	Kurang Sesuai	17	17.1%
6	Tidak Sesuai	7	7.07%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 99 responden, merasa Perencanaan pembangunan desa di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yaitu sebanyak 20 orang atau 20% yang menjawab sangat sesuai, sebanyak 40 orang atau 40,4%, yang menjawab sesuai, sebanyak 15 orang atau 15,1 %, yang menjawab



Cukup sesuai, sebanyak 17 responden atau 17,1% yang menjawab kurang sesuai, sementara yang menjawab tidak sesuai sebanyak 7 responden atau 7,07%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mayoritas menjawab sesuai yaitu sebanyak 40 reponden atau 40,4%. Hal ini dikarenakan penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Balam Jaya yaitu Bapak Jasri sebagai berikut :

*“Kita masyarakat desa selalu diajak untuk ikut dalam rapat-rapat desa, apa pun kegiatan kita selalu di ikut sertakan dek, ndak pernah lah klo ada rapat kita gak ikut, setahu bapak ikut terus”(Wawancara, 03 Maret 2017, Pukul 14:20 wib)*

### **5.2.3 Pemerintah Desa Wajib Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalan gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Proses penggalan gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi melalui Musyawarah Dusun atau Musyawarah Khusus unsur masyarakat. Metode yang digunakan adalah Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discusion (FGD)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan Alat yang digunakan yaitu Sketsa Desa, Kalender Musim, Bagan Kelembagaan. Jika mengalami kesulitan atau hambatan dalam menggunakan alat yang ada, maka Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat yang lain yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dalam memfasilitasi penggalan gagasan di tingkat dusun.

Hasil penggalan gagasan masyarakat dituangkan dalam format rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa sebagai lampiran laporan pengkajian desa. Laporan pengkajian desa dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri dokumen :

- a. Data Desa yang sudah diselaraskan
- b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dari Tim penyusun RPJM Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 5.7**  
**Pernyataan Responden Pemerintah Desa Wajib Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	15	15,1%
2	Sesuai	49	49,5%
3	Cukup Sesuai	20	20,2%
5	Kurang Sesuai	9	9,09%
6	Tidak Sesuai	6	6,06%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 99 responden, merasa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Balam Jaya Kec.Tambang Kab. Kampar , yaitu sebanyak 15 orang atau 15,1% yang menjawab sangat sesuai, sebanyak 49 orang atau 49,5%, yang menjawab sesuai, sebanyak 20 orang atau 20,2%, yang menjawab Cukup sesuai, sebanyak 9 responden atau 9,09% yang menjawab kurang sesuai, sementara yang menjawab tidak sesuai sebanyak 6 responden atau 6,06%.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Balam Jaya Kec. Tambang Kab. Kampar sebagian besar responden menyatakan sesuai bahwa pemerintah desa telah menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan.

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan tanggapan responden tentang

Perencanaan sebagai indikator Dalam Pembangunan Desa di Desa Balam Jaya

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.8**

**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan Dalam Pembangunan Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

Indikator	Sub Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	
Perencanaan	Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan kewenangan Dengan Mengacu Pada Perencanaan Pembangunan Kab/Kota	18	52	10	15	4	99
	Perencanaan Pembangunan Desa Diselenggarakan dengan Mengikutsertakan Masyarakat	20	40	15	17	7	99
	Pemerintah Desa Wajib Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	15	49	20	9	6	99
Jumlah Rata-rata		17	47	15	14	6	99
Persentase		17,1%	47,5%	15,1%	14,1%	6,1%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian 2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data pada tabel diatas peneliti menganggap bahwa Perencanaan dalam Pembangunan Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten kampar sudah baik dan sudah sesuai dengan ketentuan dan kewenangan serta diselenggarakan dengan mengikutseratkan masyarakat desa serta menyelenggarakan musyawarah dalam perencanaan pembangunannya. Karena semua pernyataan posotif yang penulis ajukan sebagai angket, mayoritas menjawab sesuai yaitu sebanyak 47 responden atau 47,5%.

### **5.3 Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

Satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan.

Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam penyelenggaraan

pemerintahan sehari-hari; (2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru tentang Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan (3) semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa yang tidak merata.

Desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri.

### **5.3.1 Pembangunan Desa Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa**

Dalam pelaksanaan pembangunan ayat 2, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ayat 3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Setelah tahap perencanaan selesai dengan ditetapkannya APB Desa maka di tahun berjalan Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Daftar pelaksana kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala Desa. Setelah Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.

Apabila pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, atau sedang dalam proses menjalani sanksi pidana maka kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan tugas dari Pelaksana Kegiatan untuk membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan pembekalan kepada pelaksana kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis. Dalam hal ini yang melakukan bimbingan teknis adalah Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pesertanya adalah :

- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa
- c. Badan Permusyawaratan Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksana kegiatan
- e. Panitia pengadaan barang dan jasa
- f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- g. Lembaga pemberdayaan masyarakat.

Materi pembekalan antara lain meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan Desa

Terkait dengan persoalan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan

- b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Terkait persoalan teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa

- c. Pembangunan Desa

Terkait dengan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa

**Tabel 5.9**

**Pernyataan Responden Pembangunan Desa Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	9	9,09%
2	Sesuai	12	12,1%
3	Cukup Sesuai	15	15,1%
5	Kurang Sesuai	55	55,5%
6	Tidak Sesuai	8	8,08%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa dari 99 responden, merasa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa di Desa Balam Jaya Kec.Tambang Kab. Kampar , yaitu sebanyak 9 reponden atau 9,09% menjawab sangat sesuai, sebanyak 12 responden atau 12,1% menjawab sesuai, kemudian sebanyak 15 responden atau 15,1% menjawab cukup sesuai sebanyak 55 responden atau 55,5% reponden menjawab kurang sesuai dan sebanyak 8 responden atau 8,08% menjawab tidak sesuai.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak masyarakat atau responden yang merasa kurang sesuai bahwa pembangunan desa sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Alasan mengapa masyarakat mengatakan kurang sesuai yang banyak penulis temui di lapangan yaitu pemerintah desa melakukan pembangunan tidak merata.

### **5.3.2 Pembangunan Desa Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Dengan Melibatkan Seluruh Masyarakat Desa Dengan Semangat Gotong Royong**

Seperti kita ketahui bahwa gotong royong sangatlah penting untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi desa serta bentuk partisipasi masyarakat dalam turut serta membangun desa. Gotong royong merupakan salah satu budaya kita sebagai warga Indonesia, dan mendapat pujian dari bangsa lain dikarenakan budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia. Ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat Indonesia bisa bersatu dari Sabang hingga Merauke, walaupun berbeda agama, suku dan warna kulit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun di zaman serba modern saat ini semangat kegotong royongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal mulai terkikis habis oleh perkembangan zaman. Orang-orang sudah memikirkan kebutuhan mereka sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Hal ini jangan sampai terjadi di bangsa Indonesia yang kehilangan kepribadiannya sebagai bangsa yang kaya akan unsur budaya. Namun semakin derasnya arus globalisasi mau tidak mau kepribadian tersebut akan terpengaruh oleh kebudayaan asing yang lebih mementingkan individualisme.

Banyak sekali manfaat gotong-royong selain mempererat rasa persatuan dan kesatuan, mempercepat penyelesaian pekerjaan juga membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan dan sikap gotong royong dalam masyarakat kan menimbulkan rasa sosial yang tinggi, misalnya saja pada saat terjadi bencana alam dimana setiap orang berusaha untuk mengumpulkan dana dan membenahi infrastuktur yang rusak serta membantu pihak keamanan untuk mencari korban. Para warga akan secara otomatis sigap dalam membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menemukenali keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan gotong royong di masyarakat.

Nilai Gotong Royong yang tumbuh berkembang dalam masyarakat adalah bagian dari sistem nilai budaya bangsa, yang perlu dilestarikan secara berdaya guna dan hasil guna, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan memotivasi masyarakat





dalam memanfaatkan sumber daya lokal, serta membangkitkan semangat gotong royong dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

**Tabel 5.10**  
**Pernyataan Responden Pembangunan Desa Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Dengan Melibatkan Seluruh Masyarakat Desa Dengan Semangat Gotong Royong**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	31	31,3%
2	Sesuai	23	23,2%
3	Cukup Sesuai	17	17,1%
5	Kurang Sesuai	18	18,1%
6	Tidak Sesuai	10	10,1%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

*Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian 2017*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa 99 responden merasa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong yaitu sebanyak 31 responden atau 31,3% menjawab Sangat Sesuai, sebanyak 23 responden atau 23,2% menjawab sesuai, sebanyak 17 responden atau 17,1% menjawab Cukup sesuai, kemudian sebanyak 18 responden atau 18,1% menjawab kurang sesuai dan sebanyak 10 responden atau 10,1% menjawab tidak sesuai.

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat dengan semangat gotong royong, masyarakat merasa pembangunan yang selama ini di laksanakan oleh pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dan selalu bergotong royong. Oleh karena itu hasil tanggapan responden mayoritas menjawab sangat sesuai.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5.3.3 Pembangunan Desa Dilakukan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Dan Sumber Daya Alam (SDA) Desa

Prinsip Utama dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa adalah optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan menumbuhkan sosial capital yang dalam hal ini adalah menumbuhkan swadaya dan gotong royong masyarakat desa.

Dalam upaya optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa perlu dilakukan beberapa hal diantaranya:

- a. Pendataan dan pendaftaran calon tenaga kerja
- b. Pembentukan kelompok kerja dan pembagian jadwal
- c. System pembayaran upah

Dalam upaya optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Desa perlu dilakukan beberapa hal diantaranya:

- a. Pendataan dan penentuan kebutuhan material/bahan yang diperlukan
- b. Menentukan system pengadaan material/bahan.

Dalam upaya menumbuhkan social capital yang ada di Desa, hal yang perlu dilakukan oleh pelaksana kegiatan diantaranya:

- a. Penghimpunan swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat
- b. Pendataan sumbangan material dari masyarakat Desa dan pihak ketiga
- c. Pendataan hibah dari masyarakat Desa dan pihak ketiga
- d. Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela

- e. Penetapan jadwal kerja.

Sebagai bukti bahwa Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat, minimal perlu mengadministrasikan dokumen:

- a. Pernyataan hibah atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa. Akta hibah dibiayai melalui APB Desa
- b. Pernyataan tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa

Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan melalui jual beli
- b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi, termasuk tanaman.

Dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin, maka pembiayaan dilakukan melalui APB Desa. Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa. Pelestarian dan pemanfaatan, dilaksanakan dengan cara:

- a. Pendataan hasil kegiatan pembangunan
- b. Membentuk kelompok pemeliharaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengalokasian biaya pemeliharaan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa
- d. Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa

**Tabel 5.11**  
**Pernyataan Responden Pembangunan Dilakukan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal dan Sumber Daya Alam (SDA) Desa**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	26	26,2%
2	Sesuai	19	19,1%
3	Cukup Sesuai	44	44,4%
5	Kurang Sesuai	3	3,03%
6	Tidak Sesuai	7	7,07%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2017*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 99 responden merasa, Pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam (SDA) Desa yaitu sebanyak 26 responden atau 26, 2% menjawab sangat sesuai, sebanyak 19 responden atau 19,1% menjawab sesuai, sebanyak 44 responden menjawab cukup sesuai kemudian sebanyak 3 responden atau 3,03% menjawab kurang setuju dan sebanyak 7 responden atau 7,07% menjawab tidak sesuai

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden menjawab cukup sesuai, hal ini di karenakan pemerintah desa belum maksimal dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam Desa, karena dalam pembangunan seperti pembangunan infrastruktur masih mendatangkan bahan baku dari luar desa seperti pasir dan batu bata.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan tanggapan responden tentang Perencanaan sebagai indikator Dalam Pembangunan Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.12**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Dalam Pembangunan Desa di Desa balam Jaya Kec. Tambang Kab. kampar**

Indikator	Sub Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	
Pelaksanaan	Pembangunan Desa Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa	9	12	15	55	8	99
	Pembangunan Desa Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Dengan Melibatkan Seluruh Masyarakat Desa Dengan Semangat Gotong Royong	31	23	17	18	10	99
	Pembangunan Desa Dilakukan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal dan SDA Desa	26	19	44	3	7	99
Jumlah Rata-rata		22	18	25	25	9	99
Persentase		22,2%	18,1%	25,2%	25,2%	9,1%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian 2017

Dari data tabel diatas peneliti menganggap bahwa pelaksanaan dalam Pembangunan Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terdapat dua tanggapan yang sama banyak yaitu sebanyak 25 tanggapan responden atau 25,2% menjawab cukup sesuai dan sebanyak 25 tanggapan responden atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25,2% menjawab kurang sesuai. Menurut analisis penulis bahwa dari data tanggapan responden tersebut hal ini disebabkan masih kurang meratanya pembangunan di Desa Balam Jaya Kecamatan tambang Kabupaten kampar. Bagi responden yang menyatakan cukup sesuai karena mereka merasakan hasil pembangunan karena pembangunan dekat dengan sekitar masyarakat tersebut, sedangkan yang menjawab tidak sesuai karena mereka kurang merasakan hasil pembangunan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa berada jauh dari sekitar mereka.

#### **5.4. Pengawasan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Kontrol social akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Apabila terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa akibat ketidakmampuan atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:

- a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa
- b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan
- c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDesa adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.

3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme *'check and balance'* ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5.4.1. Masyarakat Desa Mendapatkan Informasi Mengenai Rencana Dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa

Ruang lingkup pengaturan Hak Masyarakat Desa diatur yang dalam pasal 68 berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik

Dalam UU Desa pasal 68 ayat 1 disebutkan secara jelas hak masyarakat desa.

Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa. perangkat Desa. anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa

Dalam pasal 82, UU Desa menjamin hak masyarakat dalam bidang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. dan patut dicatat, hak masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah desa. Berikut hak-hak masyarakat desa dalam pembangunan desa:

- a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

**Tabel 5.13**  
**Pernyataan Responden Masyarakat Desa Mendapatkan Informasi Mengenai Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	19	19,1%
2	Sesuai	21	21,2%
3	Cukup Sesuai	37	37,3%
5	Kurang Sesuai	12	12,1%
6	Tidak Sesuai	10	10,1%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2017*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 99 responden merasa Masyarakat Desa Mendapatkan Informasi Mengenai Rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa yaitu sebanyak 19 responden atau 19,1% menjawab sangat sesuai, sebanyak 21 responden atau 21,2% menjawab Sesuai, kemudian sebanyak 37 responden atau 37,3% menjawab Cukup Sesuai, sebanyak 12 responden atau 12,1% menjawab Kurang Sesuai dan sebanyak 10 responden atau 10,1% menjawab tidak sesuai.

Dari hasil tanggapan responden diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sudah cukup mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa di desa Balam Jaya Kecamatan tambang kabupaten kampar, karena lebih banyak yang menyatakan cukup sesuai yaitu sebanyak 37 responden atau 37,3%.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5.4.2 Masyarakat Desa Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa

Tidak ada proses pembangunan tanpa pengawasan atau pemantauan, namun dalam pelaksanaannya sering kita temukan bahwa tugas-tugas pengawasan tidak berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Kondisi demikian ini, tentunya bisa kita lihat dari banyaknya ditemukan hasil-hasil pembangunan yang sudah dikerjakan mengalami kegagalan atau tidak memberi manfaat bagi penggunanya.

Ketika hasil-hasil pembangunan yang telah dikerjakan pemerintah tidak memberi manfaat bagi masyarakat penggunanya, lantas apa yang bisa dilakukan masyarakat itu sendiri. Seyogianya bukan hanya lembaga yang terdaftar atau menjadi bagian dari Pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan. Saat ini, pengawasan dari masyarakat sudah sangat strategis dan diatur di berbagai Undang-undang. Masyarakat menjadi subjek yang layak diperhatikan karena hasil-hasil dari pembangunan itu nantinya juga untuk masyarakat.

Sejauh ini, pentingnya pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap proses pembangunan dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni Kenegaraan dan Manajemen. Dari sudut pandang Kenegaraan, masyarakat atau setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari sebuah negara demokrasi.

Jadi, dengan cara melibatkan atau menyertakan masyarakat sebagai pengawas maka akan mengurangi potensi dari kegagalan proyek-proyek pembangunan seperti yang selama ini terjadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, masyarakat desa tidak hanya dilibatkan sebagai pengawas, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan desa. Pada Pasal 78 ayat 2 disebutkan, Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Untuk ketiga tahapan ini, masyarakat desa harus diikutsertakan.

Dengan ikut sertanya masyarakat desa dalam proses pembangunan desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pengawasan, secara otomatis pintu pengawasan sudah bisa diselaraskan dengan sistem dan struktur sesuai kebutuhan. Sistem merupakan aturan-aturan yang disepakati, sedangkan struktur adalah perangkat yang dibentuk untuk memudahkan pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

Jika sistem dan struktur ini sudah diakomodasi sejak awal, akan kecil kemungkinan terjadi kecurangan ataupun kebocoran dana-dana yang dialokasikan ke desa-desa. Yang terjadi selama ini, kalangan perangkat desa maupun supra-desa (Kecamatan/Kabupaten) cenderung mengabaikan keterlibatan masyarakat desa dalam setiap mengambil kebijakan. Bahkan, ketika warga desa mempertanyakan hasil kerja karena dilihat/dirasakan tidak bermanfaat atau mubajir, tidak jarang warga yang mengungkapkan masalah itu disingkirkan dan ada yang diberi stigma bahwa yang bersangkutan tidak menginginkan adanya pembangunan di desanya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pengawasan yang dilakukan masyarakat sebenarnya sudah merupakan bagian dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan pengawasan itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, khususnya Hak untuk Mendapatkan Informasi, Hak Untuk Berpendapat, Hak untuk Melakukan Pengaduan serta Hak untuk Berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Hak-hak ini sebenarnya sudah melekat pada diri setiap warga negara tanpa terkecuali. Hanya saja, ketidaktahuan dan keapatisan selama ini sepertinya sudah tertanam bagi warga desa sehingga membuat proses pengawasan pembangunan menjadi terabaikan. Masyarakat masih enggan atau merasa takut untuk menyampaikan pelaporan atau pengaduan ke pihak yang berkompeten.

Karena itu, perlu adanya kesadaran dan kemampuan dimiliki masyarakat desa untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan desa, baik yang dilaksanakan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Provinsi maupun dari Kementerian/Lembaga Pusat.

Selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih bersifat kasuistik, temporer dan cenderung dilakukan orang atau kelompok tertentu. Selain itu, bentuk pengawasan mengarah pada penggunaan keuangan negara, sedangkan menyangkut prosedur kerja atau kebijakan yang dibuat pemerintah masih terabaikan.

Sementara, Hak Perlindungan sebagai saksi yang sudah diatur dalam Pasal 9 Undang Undang No.28 Tahun 1999 dan Pasal 34 Undang Undang No.26 Tahun 2000 yang mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi hingga saat ini belum tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat kita.



**Tabel 5.14****Pernyataan Responden Masyarakat Desa Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	16	16,1%
2	Sesuai	28	28,2%
3	Cukup Sesuai	41	41,4%
5	Kurang Sesuai	9	9%
6	Tidak Sesuai	5	5%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2017

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 99 responden merasa Masyarakat desa melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembanguna desa yaitu sebanyak 16 responden atau 16,1% menjawab sangat sesuai, sebanyak 28 responden atau 28,2% menjawab sesuai kemudian sebanyak 41 responden atau 41,4% menjawab cukup sesuai, sebanyak 9 responden atau 9% menjawab kurang sesuai dan sebanyak 5 responden atau 5% menjawab tidak sesuai.

Dari data tabel diatas dapat di ketahui bahwa masyarakat desa melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup sesuai. Masyarakat ikut dalam pengawasan atau pemantauan pelaksanaan pembangunan di desa mereka

#### **5.4.3 Masyarakat Desa Melaporkan Hasil Pemantauan Dan Berbagai Keluhan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kepada Pemerinrah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82 ayat 2 menyebutkan bahwa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Kemudian pasal 3 menyebutkan bahwa Masyarakat

Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dari kedua pasal yang disebutkan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi dan melaporkan hasil pengawasan atau pemantauannya kepada Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan desa apabila masyarakat merasa ada kejanggalan atau ketidak sesuaian sebagaimana yang telah direncanakan. Masyarakat juga dapat melaporkan oknum yang menggunakan Dana Desa tidak untuk kepentingan Desa melainkan untuk kepentingan kelompok atau pribadi

**Tabel 5.15**  
**Pernyataan Responden Masyarakat Desa Melaporkan Hasil Pemantauan Dan Berbagai Keluhan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kepada Pemerinrah Desa Dan Badan Permusywaratan Desa (BPD)**

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	7	7,07%
2	Sesuai	20	20,2%
3	Cukup Sesuai	39	39,3%
5	Kurang Sesuai	28	28,2%
6	Tidak Sesuai	5	5,05%
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

*Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian 2017*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 99 responden merasa Masyarakat Desa Melaporkan Hasil Pemantauan Dan Berbagai Keluhan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kepada Pemerinrah Desa Dan Badan Permusywaratan Desa (BPD) sebanyak 7 responden atau 7,01% menjawab sangat setuju, sebanyak 20 responden atau 20,02% menjawab sesuai, kemudian sebanyak 39 responden atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39,3% menjawab cukup sesuai, sebanyak 28 responden atau 28,2% menjawab kurang sesuai dan sebanyak 5 responden atau 5,05% menjawab tidak sesuai.

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat lebih banyak menjawab cukup sesuai yaitu sebanyak 39 responden atau 39,3%, masyarakat merasa bahwa mereka dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan mereka dalam pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan tanggapan responden tentang Pengawasan Pembangunan desa di Desa Balam Jaya Kec. Tambang Kab. Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 5.16**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Pembangunan desa di Desa Balam Jaya Kec. Tambang Kab. Kampar**

Indikator	Sub Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	
Pengawasan	Masyarakat Desa Mendapatkan Informasi Mengenai Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	19	21	37	12	10	99
	Masyarakat Desa Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan	16	28	41	9	5	99
	Masyarakat Desa Melaporkan hasil Pemantauan dan Berbagai Keluhan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7	20	39	28	5	99
Jumlah Rata-rata		14	23	39	16	7	99
Persentase		14,1%	23,2%	39,3%	16,1%	7%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Mengenai Pengawasan Pembangunan desa di Desa Balam Jaya Kec. Tambang Kab. Kampar mayoritas responden atau masyarakat memberikan jawaban cukup sesuai yaitu sebanyak 39 responden atau 39,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam pembangunan di desa balam jaya kecamatan tambang kabupaten kampar sudah berjalan cukup baik.

Untuk melihat hasil pernyataan responden pada penelitian ini secara keseluruhan apabila dilihat dari indikator Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, berikut ini penulis tampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini

**Tabel 5.17**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Analisis Pembangunan Desa di Desa Balam jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

No	Indikator	Jawaban Responden										Jumlah
		Sangat Sesuai		Sesuai		Cukup Sesuai		Kurang Sesuai		Tidak Sesuai		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Perencanaan	17	17,1	47	47,5	15	15,1	14	14,1	6	6,1	99
2	Pelaksanaan	22	22,2	18	18,1	25	25,2	25	25,2	9	8,1	99
3	Pengawasan	14	14,1	23	23,2	39	39,3	16	16,1	7	7	99
Jumlah		53	53,4	88	88,8	79	79,6	55	55,4	22	21,2	297

Sumber : Data olahan 2017

Keterangan :

F : Frekuensi

% : Persentase

Selanjutnya untuk mengetagui hasil tabulasi dalam menilai jawaban responden pada masing-masing pernyataan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Suharsimi Ari Kunto (2010:43) sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangat Baik : 5 x 53 = 265

Baik : 4 x 88 = 352

Cukup Baik : 3 x 79 = 237

Kurang Baik : 2 x 55 = 110

Tidak Baik : 1 x 22 = 22

$$F = 986$$

$$N = 297 \times 5 = 891$$

$$P = \frac{986}{1485} \times 100 \% = 66,39 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa Pembangunan Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam kategori Baik. Hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 66,39% atau berada pada jarak interval 61-80%, dikatakan Baik karena semua sudah terlaksana secara baik, baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sudah terpenuhi.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, meskipun sudah dikategorikan baik tapi, masih banyak pekerjaan rumah Pemerintah Desa Balam Jaya dalam Pembangunan Desa, banyak yang harus dibenahi, agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan dapat di rasakan manfaat nya oleh masyarakat desa.